

Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal Di Sekolah Dasar Negeri 002 Sangatta Selatan

Afdah¹, Anggra Prima², Anita Yulfiah³, Kader Kopo Lonek⁴

^{1,2,3,4}Sekolah Tinggi Agama Islam, Sangatta, Indonesia

¹a.afdah21@gmail.com, ²primaanggra@gmail.com, ³nitasyda@gmail.com, ⁴kader245@gmail.com

Abstract *The Internal Quality Assurance System (IQAS) is a strategic instrument for improving educational quality, particularly at the primary education level. The implementation of IQAS is essential to ensure the systematic and sustainable achievement of the National Education Standards. This study aims to analyze the implementation of IQAS at SDN 002 Sangatta Selatan in terms of organizational structure, application of standard operating procedures, resource management, and quality improvement programs. This study adopted a qualitative descriptive methodology using a case study design. Data were collected through in-depth interviews with one key informant, namely the school principal, and were analyzed using descriptive qualitative techniques. The findings indicate that IQAS implementation is carried out through the establishment of a quality assurance team involving all school components, participatory development of standard operating procedures, implementation of the Merdeka Curriculum through standardized teaching modules, and the development of strategic partnerships with external stakeholders. The school also implements continuous quality improvement programs, although it still faces limitations in infrastructure and challenges in providing inclusive education services. Overall, the implementation of IQAS at SDN 002 Sangatta Selatan has been conducted systematically and collaboratively; however, further strengthening is required in the areas of facilities and inclusive education.*

Keywords: *internal quality assurance system, Merdeka Curriculum, school management, primary education*

PENDAHULUAN

Peningkatan mutu pendidikan merupakan agenda strategis dalam pembangunan nasional Indonesia yang mendapat perhatian serius dari pemerintah dan para pemangku kepentingan. Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai instrumen pembentukan karakter, pengembangan potensi peserta didik, serta penyiapan sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing, dan

berakhlak mulia. Oleh karena itu, mutu pendidikan menjadi indikator penting keberhasilan penyelenggaraan pendidikan pada setiap jenjang, khususnya pendidikan dasar yang berperan sebagai fondasi awal pembentukan kompetensi peserta didik.

Komitmen negara dalam menjamin mutu pendidikan ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mewajibkan setiap satuan pendidikan melaksanakan penjaminan

mutu untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP). SNP mencakup delapan standar utama yang menjadi kriteria minimal penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan. Untuk memastikan ketercapaian standar tersebut secara sistematis dan berkelanjutan, pemerintah mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan yang terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME), SPMI dilaksanakan secara mandiri oleh satuan pendidikan melalui siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Pendidikan.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi SPMI yang efektif berperan penting dalam meningkatkan mutu Pendidikan melalui penguatan tata kelola sekolah, peningkatan kualitas pembelajaran, dan pengembangan budaya mutu secara berkelanjutan. Sallis menegaskan bahwa penjaminan mutu internal berbasis budaya mutu mampu meningkatkan konsistensi kualitas layanan pendidikan dan partisipasi warga sekolah. Sejalan dengan itu, (Lailina & Zahrok, 2020) menemukan bahwa keberhasilan SPMI dipengaruhi oleh kepemimpinan kepala sekolah, kejelasan struktur organisasi penjaminan mutu, dan keterlibatan guru dalam evaluasi serta perbaikan pembelajaran. Selain itu, Rahmati, (2022) menyatakan bahwa penerapan SPMI secara berkelanjutan mendorong perencanaan program sekolah yang lebih sistematis dan berbasis data evaluasi.

Implementasi SPMI di sekolah dasar memiliki karakteristik dan tantangan

tersendiri mengingat perannya dalam membangun literasi, numerasi, dan karakter dasar peserta didik. Penjaminan mutu pada jenjang ini tidak hanya menekankan capaian akademik, tetapi juga kualitas proses pembelajaran, iklim sekolah, dan pembentukan nilai karakter. Namun demikian, berbagai studi menunjukkan bahwa pelaksanaan SPMI di sekolah dasar masih menghadapi kendala berupa rendahnya pemahaman warga sekolah terhadap penjaminan mutu, keterbatasan sumber daya manusia, serta minimnya sarana dan prasarana pendukung.

Penelitian *Harahap et al., (2023)* menunjukkan bahwa implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di sekolah dasar masih cenderung bersifat administratif dan belum sepenuhnya terinternalisasi sebagai budaya mutu dalam pengelolaan sekolah. Pelaksanaan SPMI lebih banyak difokuskan pada pemenuhan dokumen formal dibandingkan penguatan praktik mutu pembelajaran di kelas. Temuan tersebut diperkuat oleh penelitian Ula dan Bakar (2021) yang menunjukkan bahwa Sebagian guru belum memandang SPMI sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan mutu pembelajaran, melainkan lebih sebagai tuntutan administratif. Kondisi ini mengindikasikan perlunya upaya yang lebih sistematis dan berkelanjutan untuk membangun pemahaman serta komitmen seluruh warga sekolah terhadap pentingnya SPMI sebagai bagian integral dari pengelolaan sekolah.

Tantangan implementasi SPMI semakin kompleks seiring transformasi

kurikulum dari Kurikulum 2013 menuju Kurikulum Merdeka yang menekankan fleksibilitas, pembelajaran berdiferensiasi, penguatan karakter melalui Profil Pelajar Pancasila, serta peran aktif peserta didik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kesiapan institusional sekolah menjadi factor penentu keberhasilan implementasi kurikulum Merdeka. Sekolah yang didukung oleh sistem SPMI yang kuat cenderung lebih mampu mengelola proses perubahan secara efektif Siregar dan Ramdan (2021). Selain itu, Lestari (2024) menegaskan bahwa integrasi Kurikulum Merdeka dalam kerangka SPMI berperan penting dalam menjamin kualitas pembelajaran yang berpusat pada peserta didik.

Dalam pengelolaan sekolah, SPMI tidak hanya menekankan kelengkapan dokumen mutu, tetapi juga implementasi nyata dalam praktik sehari-hari. Implementasi tersebut diwujudkan melalui struktur organisasi penjaminan mutu yang jelas, penerapan SOP secara konsisten, serta pengembangan budaya refleksi dan evaluasi berkelanjutan. Selain itu, kemitraan eksternal dengan komite sekolah, orang tua, pemerintah daerah, dan dunia usaha memiliki peran penting dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan. Anwar (2022) menegaskan bahwa sekolah yang membangun kemitraan strategis lebih mampu mengatasi keterbatasan sumber daya dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan.

SDN 002 Sangatta Selatan sebagai satuan pendidikan dasar di Kabupaten Kutai Timur menunjukkan komitmen kuat terhadap peningkatan mutu

pendidikan yang tercermin dalam visinya, yaitu "Mewujudkan Sekolah yang Beriman dan Berakhlak Mulia." Visi tersebut menegaskan orientasi mutu sekolah yang tidak hanya berfokus pada capaian akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter dan nilai-nilai keagamaan peserta didik. Namun, dalam implementasi SPMI, sekolah ini masih menghadapi berbagai keterbatasan, khususnya terkait infrastruktur dan ketersediaan sumber daya pendukung. Keterbatasan sarana dan prasarana menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal di satuan pendidikan, khususnya pada pemenuhan standar proses dan standar sarana prasarana. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa keterbatasan infrastruktur, seperti kondisi ruang kelas yang kurang memadai dan minimnya alat bantu pembelajaran dapat menghambat efektivitas proses pembelajaran dan kinerja guru, namun demikian dampaknya dapat diminimalisasi melalui pengelolaan sekolah yang adaptif, kepemimpinan visioner, serta optimalisasi sumber daya yang tersedia Merdeka, Siregar, and Paizah (2025).

Meskipun dihadapkan pada berbagai keterbatasan, SDN 002 Sangatta Selatan tetap menunjukkan komitmen dalam mengimplementasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) secara bertahap dan berkelanjutan. Upaya peningkatan mutu diwujudkan melalui penguatan tata kelola sekolah, peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, penyesuaian pelaksanaan Kurikulum Merdeka, serta pengembangan kemitraan dengan berbagai pihak

eksternal. Kondisi tersebut menjadikan SDN 002 Sangatta Selatan sebagai objek kajian yang relevan dan strategis, untuk mengkaji implementasi SPMI pada satuan pendidikan dasar yang memiliki keterbatasan sumber daya, namun tetap berupaya meningkatkan mutu Pendidikan secara berkelanjutan.

Meskipun Kajian mengenai Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) terlalu banyak dilakukan, Sebagian besar penelitian masih berfokus pada jenjang Pendidikan menengah dan Pendidikan tinggi. Penelitian mengenai implementasi SPMI padasekolah dasar, Khususnya di wilayah nonperkotaan dengan keterbatasan sumber daya, masih relative terbatas. Selain itu, sebagian besar studi terdahulu cenderung mengkaji implementasi SPMI secara umum dan belum banyak mengaitkannya dengan konteks penerapan Kurikulum Merdeka. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (*research gap*) terkait Implementasi SPMI pada sekolah dasar yang menghadapi keterbatasan sumber daya dalam mendukung peningkatan mutu Pendidikan.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada analisis komprehensif implementasi SPMI di SDN 002 Sangatta Selatan yang mengintegrasikan lima aspek utama, yaitu struktur organisasi penjaminan mutu, penerapan Standar Operational prosedur (SOP), implementasi Kurikulum Merdeka, pengembangan kemitraan eksternal, serta program peningkatan mutu beserta kendala yang di hadapi sekolah. Pendekatan ini memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai praktik penjaminan mutu internal pada sekolah

dasar dengan keterbatasan sumber daya.

Adapun tujuan penelitian ini adalah menganalisis struktur organisasi penjaminan mutu di SDN 002 Sangatta Selatan, mengkaji implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam kerangka SPMI, mendeskripsikan pelaksanaan Kurikulum Merdeka dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan, mengidentifikasi strategi kemitraan eksternal yang dikembangkan sekolah, serta mengungkap program peningkatan mutu beserta hambatan yang dihadapi dalam implementasinya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian Sistem Penjaminan Mutu Internal pada pendidikan dasar serta menjadi masukan praktis bagi sekolah dan pembuat kebijakan dalam merancang sistem penjaminan mutu yang efektif dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) secara holistik dalam konteks alami satuan pendidikan. Desain studi kasus dipilih karena memungkinkan eksplorasi secara intensif terhadap implementasi SPMI di SDN 002 Sangatta Selatan dengan mempertimbangkan karakteristik dan konteks unik satuan pendidikan tersebut.

Penelitian dilakukan di SDN 002 Sangatta Selatan, yang berlokasi di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, pada tanggal 17 Oktober 2025.

Sekolah ini dipilih karena telah menerapkan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) secara terstruktur serta memiliki latar belakang transformasi kelembagaan dari sekolah swadaya masyarakat menjadi sekolah negeri. Informan penelitian terdiri dari satu orang, yaitu kepala sekolah, yang dipilih secara purposif karena perannya yang strategis dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengkoordinasikan jaminan mutu internal, serta pemahamannya yang komprehensif mengenai kebijakan dan program SPMI. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur dan pertanyaan terbuka untuk mengeksplorasi berbagai aspek pelaksanaan SPMI secara reflektif dan kontekstual (Kvale & Brinkmann 2009; Sugiyono, 2022). Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara interaktif yang berlangsung secara berkesinambungan selama proses penelitian Miles et. al, (2014).

Validitas data dijamin melalui penerapan kriteria seperti kredibilitas, keandalan, konfirmasiabilitas, dan transferabilitas, dengan menggunakan triangulasi serta dokumentasi sistematis terhadap proses penelitian, yang memungkinkan temuan penelitian dapat dibenarkan secara metodologis Lincoln dan Guba, (1985).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Struktur Organisasi Tim Penjaminan Mutu Internal

Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di SDN 002 Sangatta Selatan didukung oleh struktur organisasi yang melibatkan hampir seluruh pendidik. Struktur ini dirancang untuk mendistribusikan peran penjaminan mutu secara fungsional sesuai dengan bidang kerja masing-masing sehingga memungkinkan terciptanya koordinasi dan akuntabilitas kolektif dalam pengelolaan mutu pendidikan. Keterlibatan berbagai unsur pendidik tersebut menunjukkan upaya sekolah dalam membangun budaya mutu yang bersifat partisipatif. Gambaran struktur implementasi SPMI di SDN 002 Sangatta Selatan disajikan pada Tabel 1

Tabel 1.
Struktur Tim Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

No.	Jabatan dalam Tim SPMI	Unsur Pelaksana	Tugas Pokok dalam Penjaminan Mutu
1	Ketua Tim Penjaminan Mutu	Kepala Sekolah	Mengkoordinasikan seluruh kegiatan penjaminan mutu internal serta memastikan keterlaksanaan kebijakan mutu sekolah.
2	Sekretaris	Guru	Mengelola administrasi penjaminan mutu, dokumentasi SOP, serta penyusunan laporan kegiatan mutu.
3	Bendahara	Guru	Mengelola dan mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang mendukung program penjaminan mutu.
4	Bagian Keuangan	Guru	Mendukung pengelolaan keuangan sekolah yang berkaitan dengan pelaksanaan program mutu.
5	Seksi Kurikulum	Guru Kelas	Mengawal implementasi Kurikulum Merdeka dan penjaminan mutu proses pembelajaran.
6	Seksi Kesiswaan	Guru	Mengelola pembinaan peserta didik, disiplin, dan pengembangan karakter siswa.
7	Seksi Keagamaan	Guru Pendidikan Agama	Mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dan karakter dalam program penjaminan mutu sekolah.

Setelah pembentukan struktur organisasi, sekolah melibatkan berbagai unsur pendidik dalam pelaksanaan penjaminan mutu internal sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah, tim penjaminan mutu internal terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara, bagian keuangan, serta beberapa seksi fungsional, yaitu kurikulum, kesiswaan, dan keagamaan, dengan melibatkan hampir seluruh guru dalam

pelaksanaannya. Keterlibatan hampir seluruh pendidik dalam tim penjaminan mutu mencerminkan penerapan prinsip kolektif dalam pengelolaan mutu Pendidikan sebagaimana *Total Quality Management* Sallis (2015). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi SPMI di sekolah tidak diposisikan semata-mata sebagai tanggung jawab kepala sekolah, tetapi juga sebagai tanggung jawab bersama seluruh warga sekolah. Kondisi ini berpotensi meningkatkan rasa memiliki terhadap program mutu serta memperkuat keberlanjutan proses evaluasi dan perbaikan mutu di sekolah. Keberadaan berbagai seksi fungsional memungkinkan pembagian tugas yang lebih jelas serta koordinasi yang lebih efektif antarunsur penjaminan mutu, sejalan dengan prinsip SPMI yang menekankan kepemilikan bersama (*ownership*) dan akuntabilitas kolektif (Kementrian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia 2016).

Implementasi Kurikulum Merdeka dan Pengembangan Kompetensi Pendidik

Implementasi Kurikulum Merdeka di SDN 002 Sangatta Selatan telah dilaksanakan secara sistematis dan terencana dengan dukungan program pengembangan kompetensi pendidik. Seluruh guru diwajibkan menyusun modul ajar sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran sebagai bagian dari kebijakan Kurikulum Merdeka yang ditetapkan oleh pemerintah. Penyusunan modul ajar tersebut menjadi instrumen penting dalam menjamin ketercapaian tujuan pembelajaran serta kualitas proses

pembelajaran yang berorientasi pada kebutuhan peserta didik. Temuan ini menunjukkan bahwa sekolah berupaya memastikan implementasi Kurikulum Merdeka tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mendukung perencanaan pembelajaran yang lebih terarah dan berpusat pada peserta didik. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa modul ajar berfungsi sebagai perangkat pembelajaran yang membantu guru merancang pembelajaran yang adaptif sesuai kebutuhan peserta didik dan capaian pembelajaran yang ditetapkan Salsabilla et.al, (2023).

Kewajiban penyusunan modul ajar menunjukkan komitmen sekolah terhadap penjaminan mutu proses pembelajaran, khususnya dalam memastikan kesiapan guru sebelum melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Praktik ini juga menunjukkan bahwa implementasi SPMI di sekolah telah diintegrasikan dengan pelaksanaan Kurikulum Merdeka melalui penguatan perencanaan pembelajaran Permendikbudristek, (2022). Peralihan dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) menuju modul ajar menuntut adanya adaptasi pedagogis serta peningkatan kompetensi profesional pendidik, baik dalam perencanaan pembelajaran, pemilihan metode, maupun pengembangan asesmen yang lebih kontekstual dan fleksibel Winarni et.al, (2023).

Selain itu, sekolah juga memfasilitasi guru untuk mengikuti pelatihan eksternal yang diselenggarakan di luar daerah sebagai bagian dari strategi pengembangan kapasitas pendidik. Program pelatihan tersebut

memberikan kesempatan bagi guru untuk memperoleh pemahaman terhadap best practices pembelajaran, pembaruan pedagogis, serta kebijakan terbaru yang relevan dengan implementasi Kurikulum Merdeka. Pelatihan eksternal ini berperan penting dalam meningkatkan kualitas profesionalisme guru secara berkelanjutan dan mendukung efektivitas implementasi kurikulum di tingkat satuan pendidikan Guskey, (2002).

Pengelolaan Sumber Daya dan Infrastruktur

Pengelolaan Pengelolaan sumber daya dan infrastruktur di SDN 002 Sangatta Selatan menunjukkan upaya sekolah dalam menyesuaikan penyelenggaraan pendidikan dengan Standar Nasional Pendidikan meskipun masih menghadapi berbagai keterbatasan fisik. Sekolah memiliki 18 ruang kelas yang dikelola dengan sistem rombongan belajar paralel, di mana setiap jenjang terdiri atas tiga kelas (A, B, dan C) dengan jumlah peserta didik maksimal 28 orang per kelas. Kondisi tersebut mencerminkan kepatuhan sekolah terhadap ketentuan jumlah peserta didik per rombongan belajar sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana Dan Prasarana Untuk SD/MI, SMP/MTs, Dan SMA/MA, (2007). Selain itu, pengaturan jumlah peserta didik yang relatif proporsional menunjukkan upaya sekolah dalam menjaga efektivitas proses pembelajaran melalui pengelolaan kelas yang lebih kondusif.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan adanya keterbatasan signifikan pada aspek sarana dan prasarana. Sekolah belum memiliki fasilitas Unit Kesehatan Sekolah (UKS) dan perpustakaan, yang disebabkan oleh keterbatasan lahan fisik. Kondisi ini tidak terlepas dari latar belakang historis sekolah yang sebelumnya merupakan bangunan swadaya masyarakat sebelum beralih status menjadi sekolah negeri. Ketiadaan UKS dan perpustakaan menjadi kesenjangan penting dalam pemenuhan standar sarana dan prasarana, mengingat kedua fasilitas tersebut merupakan komponen wajib dalam Standar Nasional Pendidikan dan berperan strategis dalam mendukung kesehatan peserta didik serta pengembangan budaya literasi BSNP, (2005). Temuan ini mengindikasikan bahwa implementasi SPMI di sekolah masih menghadapi tantangan pada aspek pemenuhan standar sarana dan prasarana. Namun demikian, keterbatasan tersebut tidak menghambat upaya sekolah untuk tetap menjalankan program peningkatan mutu melalui optimalisasi fasilitas yang tersedia dan penguatan tata kelola sekolah.

Dari sisi pembiayaan, sekolah memperoleh dukungan pendanaan yang relatif berkelanjutan dari pemerintah. Kontinuitas pencairan anggaran tersebut mendukung keberlangsungan operasional sekolah serta pelaksanaan berbagai program peningkatan mutu yang telah direncanakan. Ketersediaan pendanaan yang stabil menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan implementasi kebijakan pendidikan dan

pengelolaan sumber daya sekolah secara efektif (Hoy & Miske, 2013). Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun sekolah menghadapi keterbatasan infrastruktur fisik, dukungan pendanaan yang berkelanjutan memberikan peluang bagi sekolah untuk melakukan perbaikan sarana dan prasarana secara bertahap sesuai kebutuhan dan prioritas pengembangan sekolah.

Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan dalam Peningkatan Mutu Sekolah

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah, SDN 002 Sangatta Selatan berupaya meningkatkan mutu pendidikan melalui pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagai acuan utama dalam penyelenggaraan pendidikan. Upaya tersebut diwujudkan melalui penetapan target capaian pembelajaran serta penguatan proses pembelajaran yang mendukung perkembangan pengetahuan, keterampilan, dan karakter peserta didik. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan mutu tidak hanya berorientasi pada hasil belajar peserta didik, tetapi juga pada pemenuhan berbagai standar mutu pendidikan secara menyeluruh. Kondisi tersebut sejalan dengan konsep SPMI yang menempatkan pemenuhan dan peningkatan mutu pendidikan sebagai proses berkelanjutan untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan (kementerian pendidikan Indonesia, 2016). Selain itu, Standar Kompetensi Lulusan merupakan salah satu komponen penting yang menjadi indikator keberhasilan penyelenggaraan

pendidikan pada satuan Pendidikan (pemerintah republik Indonesia, 2021).

Temuan ini mengindikasikan bahwa sekolah telah berupaya mengintegrasikan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan ke dalam proses pengelolaan mutu secara berkelanjutan. Penerapan standar mutu yang jelas memberikan arah bagi sekolah dalam merancang program pendidikan, melakukan evaluasi, serta mengidentifikasi aspek-aspek yang masih memerlukan perbaikan. Menurut Sallis (2015), pemenuhan standar mutu yang dilakukan secara konsisten merupakan bagian penting dalam membangun budaya mutu (*quality culture*) di lingkungan pendidikan. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi SPMI tidak hanya ditentukan oleh keberadaan dokumen atau standar yang ditetapkan, tetapi juga oleh komitmen seluruh warga sekolah dalam menerapkan standar tersebut ke dalam praktik pendidikan sehari-hari.

Kemitraan Strategis dengan Stakeholder Eksternal

SDN 002 Sangatta Selatan telah membangun kemitraan strategis dengan berbagai stakeholder eksternal, baik dari sektor korporasi maupun institusi publik, sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu pendidikan. Kemitraan ini dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan kompetensi peserta didik, penguatan program sekolah, serta perluasan sumber daya pendukung pembelajaran. Bentuk dan cakupan kemitraan yang dikembangkan sekolah disajikan pada **Tabel 2:**

Tabel 2.
Kemitraan Sekolah dengan Mitra Eksternal

No.	Mitra Eksternal	Bentuk Kegiatan	Tujuan Kemitraan
1	PT Kaltim Prima Coal (KPC)	Program tanaman hias dan pelatihan dengan narasumber eksternal	Pengembangan <i>life skills</i> dan peningkatan kompetensi non-kademik siswa
2	PT Pertamina	Kegiatan perkemahan dan pemanfaatan fasilitas wilayah Pertamina	Penguatan karakter, kemandirian, dan kerja sama peserta didik
3	PDAM	Edukasi terkait layanan air bersih	Peningkatan literasi lingkungan dan kesadaran kesehatan
4	Pemadam Kebakaran	Edukasi kebencanaan dan keselamatan	Pembentukan sikap tanggap darurat dan keselamatan diri
5	Pemadam Kebakaran	Edukasi kebencanaan dan keselamatan	Pembentukan sikap tanggap darurat dan keselamatan diri
4	Pemadam Kebakaran	Guru Guru Pendidikan Agama	Pembentukan sikap tanggap darurat dan keselamatan diri.

Berdasarkan Tabel 2, kemitraan dengan PT Kaltim Prima Coal (KPC) menunjukkan pola kemitraan yang relatif berkelanjutan melalui program pengembangan life skills dan pelatihan jangka menengah dengan melibatkan narasumber eksternal. Sementara itu, kemitraan dengan PT Pertamina serta institusi publik seperti PDAM dan pemadam kebakaran memperkaya pengalaman belajar peserta didik melalui kegiatan kontekstual yang menghubungkan pembelajaran dengan kehidupan nyata. Temuan ini menunjukkan bahwa kemitraan yang dikembangkan sekolah tidak hanya berfungsi sebagai bentuk dukungan eksternal, tetapi juga menjadi strategi untuk memperluas sumber belajar dan memperkuat kompetensi peserta didik di luar pembelajaran formal. Diversifikasi kemitraan tersebut mencerminkan upaya sekolah dalam mengoptimalkan sumber daya eksternal guna mendukung peningkatan mutu pendidikan, khususnya dalam kondisi keterbatasan sarana dan prasarana yang masih dihadapi sekolah. Kondisi ini sejalan dengan pandangan Epstein dan Sanders (2006). yang menegaskan bahwa kolaborasi antara sekolah dan berbagai pemangku kepentingan dapat meningkatkan efektivitas program

pendidikan serta mendukung keberhasilan peserta didik.

Kemitraan *multi-stakeholder* yang melibatkan sektor korporasi dan institusi publik menunjukkan potensi optimalisasi program *Corporate Social Responsibility* (CSR), khususnya dari sektor industri dan energi, dalam mendukung pengembangan pendidikan dasar di wilayah sekitar Bowen *et al*, (2010). Temuan ini mengindikasikan bahwa dukungan eksternal tidak hanya memberikan manfaat dalam bentuk sumber daya dan program pendidikan, tetapi juga memperluas peluang sekolah untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Pola kemitraan tersebut memperlihatkan peran aktif sekolah dalam membangun jejaring kolaboratif yang mendukung keberlanjutan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) serta pencapaian tujuan peningkatan mutu pendidikan.

Sistem Apresiasi dan Tantangan Layanan Pendidikan Inklusif

SDN 002 Sangatta Selatan telah menerapkan sistem apresiasi sebagai bagian dari strategi peningkatan motivasi belajar dan kinerja warga sekolah. Bentuk apresiasi diberikan kepada peserta didik berprestasi melalui hadiah edukatif, seperti buku dan alat tulis, serta kepada tenaga pendidik dan kependidikan sebagai penghargaan atas kinerja dan kontribusi mereka. Pemberian apresiasi tersebut mencerminkan penerapan prinsip positive reinforcement yang efektif dalam mendorong motivasi dan perilaku positif (Skinner, 1953).

Namun demikian, hasil penelitian juga mengungkapkan adanya

tantangan dalam penyelenggaraan layanan pendidikan inklusif, khususnya bagi peserta didik berkebutuhan khusus (ABK). Keterbatasan sumber daya manusia, terutama ketiadaan guru pendamping khusus, menyebabkan sekolah belum mampu memberikan layanan pembelajaran yang optimal sesuai kebutuhan individual peserta didik. Temuan ini menunjukkan bahwa komitmen terhadap pendidikan inklusif belum sepenuhnya diimbangi dengan kapasitas implementasi yang memadai pada tingkat satuan pendidikan (Ainscow & Miles, 2008). Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi efektivitas layanan pembelajaran dan pemenuhan hak belajar peserta didik berkebutuhan khusus apabila tidak didukung oleh sumber daya yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan dukungan sistemik berupa penyediaan guru pendamping khusus serta peningkatan kompetensi guru dalam pendidikan inklusif, sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Sintesis Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal

Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di SDN 002 Sangatta Selatan menunjukkan pola yang relatif sistematis meskipun masih dihadapkan pada berbagai keterbatasan. Kekuatan utama implementasi SPMI terletak pada struktur organisasi tim penjaminan mutu yang partisipatif, komitmen terhadap implementasi Kurikulum Merdeka melalui pengembangan kompetensi pendidik, diversifikasi

kemitraan strategis dengan stakeholder eksternal, pelaksanaan program peningkatan mutu yang terintegrasi, serta penerapan sistem apresiasi yang mampu meningkatkan motivasi warga sekolah.

Di sisi lain, area yang masih memerlukan perbaikan meliputi pemenuhan standar sarana dan prasarana, khususnya ketersediaan UKS dan perpustakaan, penguatan kapasitas layanan pendidikan inklusif, serta dokumentasi implementasi SPMI yang lebih sistematis sebagai dasar evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Dari perspektif *Total Quality Management* (TQM), implementasi SPMI di sekolah ini telah mencerminkan prinsip *customer focus*, *total involvement*, *continuous improvement*, dan *strategic partnerships* (Deming, 1986; Sallis 2015). Hal ini menunjukkan bahwa budaya mutu mulai terinternalisasi dalam tata kelola sekolah, meskipun belum seluruh standar pendidikan dapat dipenuhi secara optimal. Oleh karena itu, penguatan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa proses perbaikan mutu tidak hanya berlangsung secara administratif, tetapi juga berdampak nyata terhadap peningkatan kualitas layanan Pendidikan (Hoy & Miske, 2013).

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kemitraan yang telah dibangun sekolah memberikan kontribusi positif terhadap berbagai program peningkatan mutu. Kondisi ini menunjukkan bahwa dukungan pihak eksternal menjadi salah satu faktor yang mendukung implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di SDN 002 Sangatta

Selatan. Selain itu, konteks sosio-ekonomi Kabupaten Kutai Timur yang didominasi oleh aktivitas pertambangan menunjukkan adanya potensi dukungan berkelanjutan dari sektor industri melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Oleh karena itu, potensi tersebut perlu dilembagakan dalam bentuk kerja sama jangka panjang, seperti nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding* atau MoU), guna menjamin keberlanjutan kemitraan dan memperkuat kontribusinya terhadap peningkatan mutu pendidikan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di SDN 002 Sangatta Selatan telah berjalan secara sistematis dan partisipatif. Sekolah telah membangun tata kelola mutu melalui pembentukan Tim Penjaminan Mutu Internal dengan struktur organisasi yang fungsional serta melibatkan hampir seluruh pendidik dan wali murid dalam penyusunan kebijakan, regulasi sekolah, dan perumusan visi-misi. Kondisi ini mencerminkan penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam pengelolaan mutu pendidikan.

Pelaksanaan Kurikulum Merdeka didukung oleh kewajiban penyusunan modul ajar dan program pelatihan eksternal bagi pendidik, yang menunjukkan komitmen sekolah dalam meningkatkan profesionalisme guru dan mutu proses pembelajaran. Selain itu, sekolah juga mengembangkan kemitraan strategis dengan berbagai

stakeholder eksternal, seperti perusahaan dan institusi publik, yang berkontribusi dalam mendukung program pembelajaran serta perluasan akses terhadap sumber daya pendidikan. Program peningkatan mutu dilaksanakan secara terintegrasi melalui kegiatan literasi, pembinaan spiritual, pengembangan kreativitas, dan penguatan karakter peserta didik.

Meskipun demikian, implementasi SPMI masih menghadapi sejumlah keterbatasan, terutama pada aspek sarana dan prasarana, seperti ketiadaan UKS dan perpustakaan, serta keterbatasan layanan pendidikan inklusif akibat kurangnya tenaga pendidik khusus. Oleh karena itu, diperlukan dukungan berkelanjutan dari pemerintah daerah dan stakeholder terkait guna memperkuat pemenuhan standar sarana prasarana serta pengembangan layanan pendidikan inklusif, sehingga implementasi SPMI dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainscow, M., & Miles, S. (2008). Making Education for All Inclusive: Where Next? *Prospects (Quarterly Review of Comparative Education)*, 38(1), 15–34.
<https://doi.org/10.1007/s11125-008-9055-0>
- Bowen, H., Moon, A., & Matten, D. (Eds.). (2010). *The Oxford Handbook of Corporate Social Responsibility*. Oxford University Press.
- Brinkmann, S. K. & S. (2009). *InterViews: Learning the Craft of Qualitative Research Interviewing*. SAGE Publications.

- BSNP. (2005). *Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar dan Menengah*.
- Deming, W. E. (1986). *Out of the Crisis*. Massachusetts Institute of Technology, Center for Advanced Engineering Study (MIT Press).
- Dewi, P., Anwar, S., Kurikulum, W., & Kejuruan, S. M. (2022). *Jurnal manajer pendidikan*. 16(2016), 30–39.
- Epstein, J. L., & Sanders, M. G. (2006). Prospects for Change: Preparing Educators for School, Family, and Community Partnerships. *Peabody Journal of Education*, 81(2), 81–120. https://doi.org/10.1207/S15327930PJE8102_3
- Guskey, T. R. (2002). Professional Development and Teacher Change. *Teachers and Teaching: Theory and Practice*, 8(3), 381–391. <https://doi.org/10.1080/135406002100000512>
- Harahap, M. S., Gultom, S., & Nasution, N. F. (2023). KAJIAN IMPLEMENTASI SPMI (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL) SEKOLAH DAN PERGURUAN TINGGI DI INDONESIA. 11(1), 477–480. <https://doi.org/10.37081/ed.v11i1.4616>
- Hoy, W. K., & Miske, C. G. (2013). *Educational Administration: Theory, Research, and Practice* (9th Editio). McGraw-Hill Education.
- Indonesia, pemerintah republik. (2021). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan*. [https://www.peraturan.go.id/id/pp-no-57-tahun-](https://www.peraturan.go.id/id/pp-no-57-tahun-2021?utm_source=chatgpt.com)
- Indonesia, K. P. dan K. R. (2016a). *Pedoman Umum Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah*. https://repository.kemendikdasmen.go.id/4858/?utm_source=chatgpt.com
- Indonesia, K. P. dan K. R. (2016b). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah*.
- Lailina, A., & Zahrok, N. (2020). *Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)*. 8(2), 196–204.
- LESTARI, S. R. I., NURAINI, H., WIDIART, A., & FADHILA, S. R. I. A. (2024). Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka Di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. *LEARNING: Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan Dan Pembelajaran*, 4(3), 784–804.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. SAGE Publications.
- Merdeka, I., Siregar, W., & Paizah, N. (2025). *Dampak keterbatasan sarana dan prasarana terhadap keefektifan pembelajaran peserta didik*. September, 16413–16420.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd Editio). SAGE Publications.
- Panduan Pembelajaran Dan Asesmen Kurikulum Merdeka (2022).
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24

- Tahun 2007 Tentang Standar Sarana Dan Prasarana Untuk SD/MI, SMP/MTs, Dan SMA/MA (2007).
- Rahmati. (2022). *Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) terhadap Peningkatan Manajemen Mutu Pendidikan dan Daya Saing Al Mashduqi Boarding School Garut*. 82–89
<https://doi.org/10.52434/jesm.v3i02.419>.
- Sallis, E. (2015). *Total Quality Management in Education* (3rd Editio). Routledge.
- Salsabilla, I. I., & Jannah, E. (2023). Analisis modul ajar berbasis Kurikulum Merdeka. *Jurnal Literasi dan Pembelajaran Indonesia*, 3(1), 33–41. <https://jurnalfkip.samawa-university.ac.id/JLPI/article/view/384>
- Siregar, E., Ramdan, D., & Universitas Medan Area. (2021). *Pedoman akademik mahasiswa tahun akademik 2020/2021*. Universitas Medan Area.
<https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/15301>
- Skinner, B. F. (1953). *Science and human behavior*. The Macmillan Company.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian: Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
<https://inlislite.ipdn.ac.id/opac/detail-opac?id=9274>
- Ula, H., & Abu Bakar, M. Y. (2021). *Implementasi sistem penjaminan mutu internal (SPMI) pada masa pandemi Covid-19 di sekolah menengah pertama*. Dirasat: Jurnal Manajemen dan Pendidikan Islam, 7(2), 192–203.
<https://doi.org/10.26594/dirasat.v7i2.2623>
- Winarni, R., Setiawan, B., & Suyanto, S. (2023). *Kesiapan guru dalam penyusunan modul ajar pada implementasi Kurikulum Merdeka*. *Jurnal Basicedu*, 7(3), 1689–1698.
<https://doi.org/10.31004/basicedu.v7i3.5221>